**TINJAUAN YURIDIS PENGHAPUSAN PIDANA MATI DARI
PEMIDANAAN DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2017)**

Oleh : Asri Evangeline Silalahi

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH., MH

Pembimbing II : Dr. Mukhlis, SH.,MH.

Alamat : Jl. Citra Sari Nomor 12A, Tangkerang Selatan, Pekanbaru

Email : asrievangeline97@gmail.com. Telepon : 085355400160

ABSTRACT

The right to life is protected by a constitution that is imbued with humanity in Pancasila, but to date the Indonesian legal system still applies to the death penalty. This is in contradiction with the concept of humanity in Pancasila. The right to life is a category of rights that cannot be violated, reduced, and limited under any circumstances, including within the limits of formal regulations because the Constitution of the Republic of Indonesia is the highest provision in a state of law in Indonesia and no other provisions who can rule it out. The purpose of writing this thesis, namely; First, to find out whether capital punishment is still relevant to be maintained in the Criminal Code and other laws and regulations in Indonesia, Second, to find out the ideal concept of fulfilling human rights related to capital punishment in the Unitary State of the Republic of Indonesia.

This type of research is normative legal research, library law research by conducting the study of legal principles. Data sources used in this study are secondary data, namely data obtained from literature such as legal journals, books, judges' decisions related to research. This data analysis is done qualitatively and deductive conclusions are drawn.

From the research results there are two main problems that can be concluded. First, Indonesia is a country that still adheres to the death penalty in its positive law. Capital punishment is no longer relevant to be maintained in the new National Criminal Code in Indonesia or the provisions of regulations outside the Criminal Code, because capital punishment is contrary to the souls that exist in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and besides that capital punishment shows the inability of the state to educate prisoners in a better direction. Second, the protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights are the responsibility of the state, especially the Government. Life sentence in moral, physical and psychological terms is far more severe than a death sentence. The government must draft a Criminal Law in accordance with the constitutional directives and a number of Human Rights Laws, one of which is to revoke articles containing the death penalty.

Keywords: *Death Penalty, Human Rights*

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, setelah amandemen ketiga. Manusia dalam kehidupannya selalu bersentuhan dengan hukum, hukum merupakan suatu perkara yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup manusia.¹

Hukuman muncul salah satunya untuk mengantisipasi dan menangani kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 dikenal bermacam-macam sanksi pidana. Salah satu sanksi yang paling berat adalah pidana mati.² Pidana mati diberikan dalam rangka menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan yang sangat serius. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana.

Berbicara pada konteks pidana, pidana mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan pidana mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun demikian dalam kenyataannya, penerapan pidana mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari

berbagai kasus tindak pidana yang ada.³

Secara normatif, hak untuk hidup telah diatur didalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara eksplisit menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Telah jelas bahwa hak untuk hidup (*right to life*) merupakan kategori hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, serta dibatasi dalam keadaan apapun, termasuk dalam batasan regulasi formal karena Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan ketentuan tertinggi sebagai suatu negara hukum di Indonesia dan tidak ada ketentuan lain yang dapat mengesampingkannya.⁴ Sehingga semua produk hukum yang masih mencantumkan pidana mati sebagai ancaman pidana harus diubah atau dibenahi.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Hendardi, dengan tegas mengatakan bahwa hukuman mati tidak dapat dibenarkan.⁵ Dilihat dari perspektif hak asasi manusia karena secara substansial bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yakni Pasal 3 “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan

¹ Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum*., PT. Dyatama Milenia, Jakarta, 2004, hlm. 10.

² Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³ M. Zen Abdullah, Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Kontek Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Jambi. 2009, hlm. 61.

⁴<http://www.gresnews.com/berita/Tips/103313-legalitas-hukuman-mati-di-indonesia>, diakses tanggal, 12 Januari 2019, jam :22.10 WIB

⁵ Yon Artiono Arba'I, *Aku Menolak Hukuman Mati*., Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2012, hlm. 136

keselamatan sebagai individu” dan Pasal 5 “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi”.⁶ Roeslan Saleh, Guru Besar Hukum Pidana berpendapat dengan alasan kalau ada keliru putusan hakim tidak dapat diperbaiki lagi dan berdasarkan landasan filsafat Negara Pancasila, maka pidana mati dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan.⁷

Perdebatan pidana mati kembali mencuat dengan adanya pengujian ketentuan pidana mati. Sekelompok narapidana narkotika mengajukan permohonan pengujian dalam waktu hampir bersamaan, yaitu dua orang warga negara Indonesia dan dua orang warga negara asing dalam perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007. Para pemohon mengajukan pengujian ketentuan pidana mati sesuai kondisi yang dialami yaitu sebagai terpidana mati dalam perkara tindak pidana narkotika. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menolak permohonan para pemohon terhadap pengujian ketentuan pidana mati selalu menuai kontroversial. Terdapat pihak-pihak yang memberikan kecaman ketidaksepakatan terhadap putusan tersebut. Pendapat berbeda (*dissenting opinions*) datang dari Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi yang berpendapat bahwa permohonan *aquo* seharusnya dinyatakan dikabulkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini

dengan judul yaitu: “*Tinjauan Yuridis Penghapusan Pidana Mati Dari Pemidanaan Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)*”.

A. Rumusan Masalah

1. Apakah pidana mati masih relevan untuk dipertahankan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal pemenuhan Hak Asasi Manusia terkait pidana mati di Negara Kesatuan Republik Indonesia?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui apakah pidana mati masih relevan untuk dipertahankan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui konsep ideal pemenuhan Hak Asasi Manusia terkait pidana mati di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan Strata Satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b) Untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau khususnya pada program kekhususan hukum pidana dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca. Serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan penelitian yang terkait.
- c) Hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam

⁶ Pasal 3 dan Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

⁷ Davit Rahmadan, “Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm. 97

melakukan penegakan hukum terhadap pidana mati di Indonesia.

C. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Salah satu perubahan substansial yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah dimasukkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang memuat 10 pasal yaitu pasal 28A hingga 28J.⁸ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹ Dirujuk dari sumbernya, Hak Asasi Manusia berasal dari Tuhan, sedangkan hak dasar, asalnya dari negara atau pemerintah. Hak Asasi Manusia bersifat universal, sedangkan hak dasar bersifat domestik. Fungsi Hak Asasi Manusia adalah mengawal hak dasar (*legal rights*).¹⁰

Hak-hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat menjadi HAM akan menjadi hak-hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hierarki norma hukum biasa, utamanya ditempatkan dalam suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Artinya memperbincangkan kerangka normatif dan konsepsi hak-hak konstitusional sesungguhnya tidaklah jauh berbeda dengan bicara Hak Asasi Manusia.¹¹

Memperhatikan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, dengan jelas dan tegas mengakui eksistensi nilai-nilai kemanusiaan baik individual maupun kolektifitas, sehingga HAM dalam pandangan Pancasila sebagai ideologi negara mengakui eksistensi nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dihargai.¹² Suatu kebebasan yang didasarkan pada Pancasila harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, sehingga bersifat tidak mutlak dan restriktif.¹³

Menurut Jimly Asshidiqie, hak konstitusional warga negara yang meliputi Hak Asasi Manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD NKRI 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau setiap warga negara yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin.¹⁴ HAM tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai/asas-asas yang terkandung di dalam Pancasila. Konsepsi HAM dalam UUD 1945 berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara hal individual dengan hak sosial/komunal. Meskipun demikian yang dipentingkan adalah hak sosial/komunal yang tercerminkan dalam *rechtside* Indonesia yang

⁸ Martinus Kleden, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, Lamarela, Yogyakarta:2008, hlm.1.

⁹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰ Nurul Qamar, *Op.cit*, hlm.17.

¹¹ R. Herlambang Perdana Wiratraman, Hak-hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945:Konsep, Pengaturan dan

Dinamika Implementasi, *Jurnal Hukum*, Panta Rei, Vol.1, 2007, hlm.1.

¹² Nurul Qamar, *Loc.Cit*, hlm.94.

¹³ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru:2012, hlm.127.

¹⁴ Ar-Ahshi Thahurl, Aspek Konstitusionalitas Kesetaraan Gender Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia, *Jurnal*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Vol.9 No.1, April 2012, hlm.7.

bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian hak individual yang bersifat egoistis melekat di dalamnya hak solidaritas untuk mencapai kemakmuran bersama.¹⁵

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat melindungi HAM, baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman, baik bagi perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran HAM.¹⁶ Secara konstitusional, tanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia berada pada negara, terutama pemerintah.¹⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Pertimbangan tentang tujuan yang ingin dicapai dengan penjatuhan pidana merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana. Hal ini akan dipaparkan dalam teori pidanaan. Oleh sebab itu, untuk mendukung uraian teori-teori tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu makna dan hakikat pidana itu sendiri.

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁸ Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik dan hal ini mewujudkan suatu nestapa yang

dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹⁹ Sir Robert Cross ikut merumuskannya sebagai berikut, “*punishment is the infliction of pain by the state on someone who has been convicted of an offence.*”²⁰ Dan Black’s Law Dictionary mendefinisikan pidana sebagai “*any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime of offence committed by him, or for his omission of duty enjoined by law.*”²¹

Defenisi-defenisi tersebut memperlihatkan beberapa unsur atau ciri perbuatan pidana, yaitu bahwa pidana, pada hakikatnya, merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau berwenang, dan pidana tersebut dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dalam masalah pemberian pidana, pertentangan anatar dua aliran dalam hukum pidana —aliran klasik dan aliran modern—mencapai puncaknya. Aliran klasik lebih menyoroti perbuatan yang dilakukan, sementara aliran modern pertama-tama meninjau pembuatnya dan menghendaki individualisasi pidana. Artinya, pidanaan harus memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa dalam pemberian pidana aliran klasik lebih melihat ke belakang, sementara aliran modern

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta:2006, hlm. 9.

¹⁷ Muhammad Sukroni, *Gagasan Perluasan Legal Standing Dalam permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia*, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm.15.

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I.*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 9.

¹⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia.*, Aksara Baru, Jakarta. hlm. 5.

²⁰ Sir Rupert Cross and Andrew Ashworth, *The English Sentencing System*, *West Law*, London:Butterworths, 1981, hlm. 124

²¹ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary* (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1979) hlm. 1110

lebih melihat ke depan. Dilihat dari tujuannya, Indonesia menggunakan teori gabungan. Menurut teori gabungan, pembedaan merupakan pembalasan terhadap pelanggaran suatu norma sekaligus pembinaan kepada narapidana agar bisa berguna di masyarakat. Pembalasan memang merupakan dasar pembenaran pidana, namun dalam menjatuhkan pidana, harus selalu diperhatikan pula apa yang dapat dicapai dengan pidana itu. Hanya yang bersalahlah yang boleh dipidana. Pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran.

Tujuan lainnya, menurut Rossi adalah perbaikan tata tertib masyarakat. Jadi, pidana harus memberikan manfaat pada tata tertib masyarakat. Tujuan penting lain dari pidana ialah prevensi umum. Akibat penting dari pidana adalah teguran yang diberikan menimbulkan rasa takut, begitu pula perbaikan terhadap penjahat. Namun, dia tidak berharap banyak mengenai poin yang terakhir ini. Rossi mengatakan bahwa memperbaiki para penjahat merupakan usaha yang paling tidak pasti membawa hasil. Di samping itu, disebutkan dua akibat lain, yaitu memberikan kepuasan moral kepada masyarakat serta menimbulkan perasaan aman dan sentosa. Penganut teori ini antara lain, Zevenbergen, Pompe, Hugo de Groot, Rossi, dan Teverne.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penulisan ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam proses penelitian ini:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah cara melihat atau meninjau dan

mempelajari suatu masalah secara mendalam, kemudian memberikan pandangan terhadap masalah tersebut,²² menurut yang ditetapkan oleh hukum (Undang-Undang).

2. Penghapusan

Penghapusan adalah proses, cara, perbuatan menghapuskan, peniadaan, pembatalan dan sebagainya.

3. Hukuman Mati

Hukuman mati adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang membuat nyawa si terhukum menghilang.²³ Hukuman mati adalah pembunuhan berencana yuridik seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. JE. Sahetapy, SH. Hukuman mati berlawanan dengan kodrat alam, dimana manusia pada hakikatnya dengan naluri dan insting yang ada padanya, manusia akan berusaha mempertahankan hidupnya dari segala ancaman atas dirinya.²⁴

4. Pidana

Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.²⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum *doctrinal*. Dalam penelitian normatif

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan, Balai Pustaka, 1996, hlm. 1198.

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 41.

²⁴ <http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham-/>, diakses tanggal 10 April 2019, jam 20.31 WIB.

²⁵ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 149.

ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁶ Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu,, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam Perundang-Undangan tertentu.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian, yaitu;

a. Bahan Hukum Primer

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan penulis yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan terhadap Pelanggar Hak Asasi Manusia
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme
- 7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02-03/PUU-V/2007 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, ataupun hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, surat kabar, dan sebagainya.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*: Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 24.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta : 2005, hlm. 81

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu design risetnya dimulai dari teori dan berakhir pada fakta. Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir *deduktif* yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Mati Berdasarkan Hukum Positif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berpedoman pada asas hukum yang merupakan jantungnya hukum maka menurut asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, kalau terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya maka tingkatan yang tinggilah yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi pertentangan antara undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai

pidana mati, maka yang menjadi acuan landasan hukum tertinggi adalah UUD 1945, dengan demikian pidana mati yang ada dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan diluar KUHP secara yuridis bertentangan dengan rohnya UUD 1945. Sedangkan Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 sesuai dengan jiwa yang ada didalam UUD 1945.

Oleh karena itu didalam penegakan hukum Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana mati harus memperhatikan UUD 45 dan HAM, karena HAM²⁸ merupakan seperangkat hak melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹⁵.

Pidana mati yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan (*criminal*) dalam pandangan HAM suatu pelanggaran, karena asas legalitas yang mendasarkan titik berat pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukuman pidana harus bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 dimana setiap ada perubahan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling bagi tersangka.

Dalam pasal KUHP maupun diluar KUHP ancaman yang ada dalam undang-undang tersebut pada hakikatnya alternatif seperti: Barang siapa dengan sengaja dan dengan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum pembunuhan direncanakan (*Moord*) dengan

²⁸ Pasal 28 A, UUD 1945 Amandemen ke-II tanggal 18 Agustus 2000.

hukuman mati atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun¹⁶, dengan ancaman pidana mati dalam undang-undang tidak mutlak Hakim menjatuhkan putusan pidana mati kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan berpedoman kepada pasal tersebut diatas serta dengan mengkaitkan kepada UUD 45 dan HAM.

Berdasarkan uraian diatas menurut hemat Penulis pidana mati tidak relevan lagi untuk dipertahankan dalam KUHP Nasional yang baru di Indonesia maupun ketentuan peraturan diluar KUHP, karena pidana mati bertentangan dengan jiwa yang ada dalam UUD 1945 serta Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan disamping itu pidana mati menunjukkan ketidak mampuan negara mendidik narapidana ke arah yang lebih baik

B. Konsep Ideal Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terkait Pidana Mati Di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbicara pada konteks pemenuhan Hak Asasi Manusia terkait pidana mati, maka diperlukan berbagai metode. Adapun konsep ideal dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia terkait pidana mati di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut :

- 1) Hukuman mati pada akhirnya bukanlah solusi atas kejahatan, juga bukan efek jera bagi mereka yang akan melakukan hal yang sama. Hal ini dibuktikan oleh sejak hukuman mati diberlakukan di berbagai belahan dunia ini, tak ada jaminan akan segera melenyapkan kejahatan yang serupa. Hal ini akan berimbas pada musnahnya kuantitas manusia itu sendiri, padahal dengan berkurangnya kuantitas

manusia tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas manusia untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu sebelum rusaknya nilai kuantitas manusia yang berkurang baik, alangkah lebih efeknya jika membenahi sisi kualitas dari manusia itu sendiri. Pengguna narkoba tidak perlu dipidana, melainkan dikenai penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup dari segi moral, fisik, dan psikologis itu jauh lebih berat dari hukuman mati. Contohnya, penindakana perkara narkoba di Portugal. Di sana, para pengguna narkoba bukan diadili oleh hakim, tetapi ditangani petugas kesehatan atau orang yang mengerti soal adiksi.

- 2) Cara pandang negara, terutama pemerintah, penegak hukum dan kehakiman, perlu berubah. Negara punya dasar hukum yang kuat untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia, tak kecuali terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana sebagaimana dalam konstitusi dan beberapa Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Demi masa depan yang lebih beradab, sudah seharusnya pemerintah merancang Undang-Undang Pidana yang sesuai dengan perintah konstitusi dan sejumlah Undang-Undang Hak Asasi Manusia, salah satunya adalah mencabut pasal yang mengandung hukuman mati. Selain itu perlu diingat, bahwa hukuman mati tidaklah mengurangi angka kejahatan. Ketika sejumlah narapidana narkoba dihukum mati, kejahatan narkoba malah

meningkat. Data Polri menunjukkan, kasus narkoba meningkat 13,6 persen setiap tahun. Kapolri Tito Karnavian mengungkapkan, telah terjadi peningkatan kasus narkoba sebesar 19,62 persen pada tahun 2017.²⁹

- 3) Sistem peradilan pidana, KUHAP haruslah menyesuaikan dengan kewajiban negara menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia. Siapapun tersangka, terdakwa dan narapidana, mereka adalah manusia, sehingga prosedur tindakan, perlakuan dan pelaksanaan hukuman tak boleh merusak mental dan tubuh. Entitas pemenuhan hak asasi manusia para terpidana mati yang perlu berikutnya dilaksanakan adalah peran pemerintah. Penerapan hukuman mati tak berdampak pada efek jera. Tidak ada korelasi antara hukuman mati dengan perang terhadap narkoba. Bahkan yang terjadi malah sebaliknya, penyalahgunaan narkoba tetap meningkat. Sebaliknya, yang mesti dibangun adalah penegak hukum mesti sempurna. Efek jera di Indonesia tak ubahnya sistem liberal, semua diserahkan pada kesadaran hukum warga negara. Sekalipun negara menerapkan hukuman mati, mesti dipastikan ruang upaya hukum diberikan terhadap terpidana mati. Selain itu, negara wajib memperbaiki sistem hukum.

²⁹<http://www.google.co.id/amp/s/nasional.okezone.com/amp/2017/10/12/337/1793960/opini-hukuman-mati-perlu-dihapus>, diakses tanggal 8 september 2019, jam 22.38 wib

F. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia bahwa hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman khusus yang diterapkan secara selektif, hati-hati dan dikhususkan pada kasus-kasus tertentu. Indonesia termasuk negara yang masih menganut hukuman mati dalam hukum positifnya. Pidana mati tidak relevan lagi untuk dipertahankan dalam KUHP Nasional yang baru di Indonesia maupun ketentuan peraturan diluar KUHP, karena pidana mati bertentangan dengan jiwa yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan disamping itu pidana mati menunjukkan ketidak mampuan negara mendidik narapidana ke arah yang lebih baik..
2. Hukuman mati pada akhirnya bukanlah solusi atas kejahatan, juga bukan efek jera bagi mereka yang akan melakukan hal yang sama. Hal ini dibuktikan oleh sejak hukuman mati diberlakukan di berbagai belahan dunia ini, tak ada jaminan akan segera melenyapkan kejahatan yang serupa. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah. Pengguna narkoba tidak perlu dipidana mati, melainkan dikenai penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup dari segi moral, fisik, dan psikologis itu jauh lebih berat dari hukuman mati. Pemerintah haruslah merancang Undang-Undang Pidana yang sesuai dengan perintah konstitusi dan

sejumlah Undang-Undang Hak Asasi Manusia, salah satunya adalah mencabut pasal yang mengandung hukuman mati.

SARAN

1. Diharapkan adanya penyesuaian paradigma aparat pemerintah terhadap Perundang-undangan yang masih mengatur hukuman mati dan sedapat mungkin pemerintah haruslah merancang Undang-Undang Pidana yang sesuai dengan perintah konstitusi dan sejumlah Undang-Undang Hak Asasi Manusia, salah satunya adalah mencabut pasal yang mengandung hukuman mati.
2. Sangat diharapkan kepada para pemerhati hak asasi manusia menggunakan hak partisipasinya untuk disampaikan kepada pembentuk undang-undang, agar hukuman mati dirumuskan secara lebih cermat dan lebih hati-hati, yang pada gilirannya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia baik terhadap pelaku maupun korban dirasakan memiliki nilai kesamaan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, Tunggal, Wawan. 2004. *Memahami Profesi Hakim*. PT. Dyatama Milenia. Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arba'I, Artiono, Yon. 2012. *Aku Menolak Hukuman Mati*. Grafika Mardi Yuana. Bogor.
- Atmadja, I Dewa Gede, 2012. *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang.
- Christiansen, O, Karl. 1974. *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, UNAFEI. Tokyo.
- Firdaus Emilda, 2012, *Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru.
- Harahap, A Bazar, 2006. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Penerbit Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia, Jakarta.
- Haryono, Dodi, 2009. *Ilmu Perundang-Undangan*, Pusbangdik, Pekanbaru.
- Hartanti, Evi, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indrati, Farida Maria, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kartanegara, Satocid, 2008. *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Kleden, Martinus. 2008. *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, Lamarela, Yogyakarta.
- Lopa, Baharuddin, 2001. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta
- Marzuki, Mahmud, Peter. 2010. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

- Saleh, Roeslan. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta.
- Salim HS. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sianturi, Mompang. 1996. *Hukum Penintensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Soeharto. 1993. *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Hukum Pidana I*, Alumni. Bandung.
- Utrecht. 1986. *Rangkuman Sari Kuliah : Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- B. Jurnal**
- Abdullah, Zen, M. 2009. *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Kontek Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi, Jambi.
- Astri Wulandari, 2010, *Perbandingan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Ar-Ahshi Thahurl, 2012, *Aspek Konstitusionalitas Kesetaraan Gender Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia*, Jurnal, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Vol.9 No.1.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya : 1996.
- Ferawati, 2014, “Kajian Hukum dan HAM Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 3 September 2014.
- Herlambang Perdana Wiratraman, 2007, “Hak-hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945:Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi”, *Jurnal Hukum*, Panta Rei, Vol.1, 2007.
- Komariah, Permasalahan Pidana Mati Dewasa Ini Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Hukum*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Volume.4, No.1 Desember 2007.
- Murti Sari Dewi, 2016, “Pengaturan Hukuman Mati Dalam Materi Muatan Undang-Undang Dikaitkan Dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”, “*Skripsi*”, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Sir Rupert Cross and Andrew Ashworth, 1981, *The English Sentencing System*, London:Butterworths, *Jurnal West Law*, akses pada tanggal 29 April 2019
- Rahmadan, Davit, 2010, Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau. 1(1): 97-111
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958
Republik Indonesia tentang
Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2000 tentang Pengadilan
terhadap Pelanggar Hak Asasi
Manusia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2003 tentang Anti Terorisme

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan *International
Covenant on Civil and
Political Rights* (Konvenan
Internasional tentang Hak-Hak
Sipil dan Politik)

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 02-03/PUU-
V/2007

E. Website

<http://www.warungdelik.wordpress.com/2013/06/02/pengertian-penelitian-studi-kasus>.
Terakhir dikunjungi tanggal 08
Januari 2019.

<http://www.gresnews.com/berita/Tips/103313-legalitas-hukuman-mati-di-indonesia/> diakses pada 12
Januari 2019.